

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**NAMA : SEPTI DWI EKARINI
NIM : 20010610093**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA**

Diajukan oleh:

SEPTIEDWI EKARINI

20010610093

Telah disetujui Dosen Pembimbing pada tanggal: 5 Agustus 2005

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

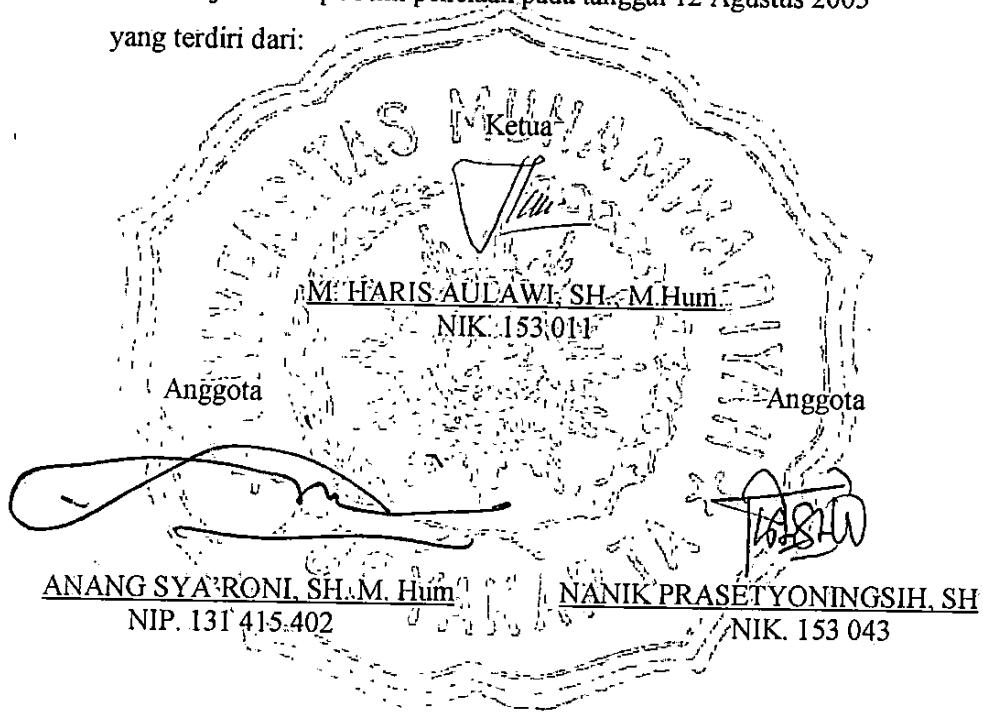
ANANG SYA'RONI, SH. M. Hum
NIP. 131 415 402

NANIK PRASETYONINGSIH, SH
NIK. 153 043

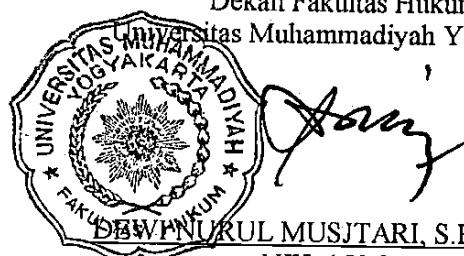
HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA**

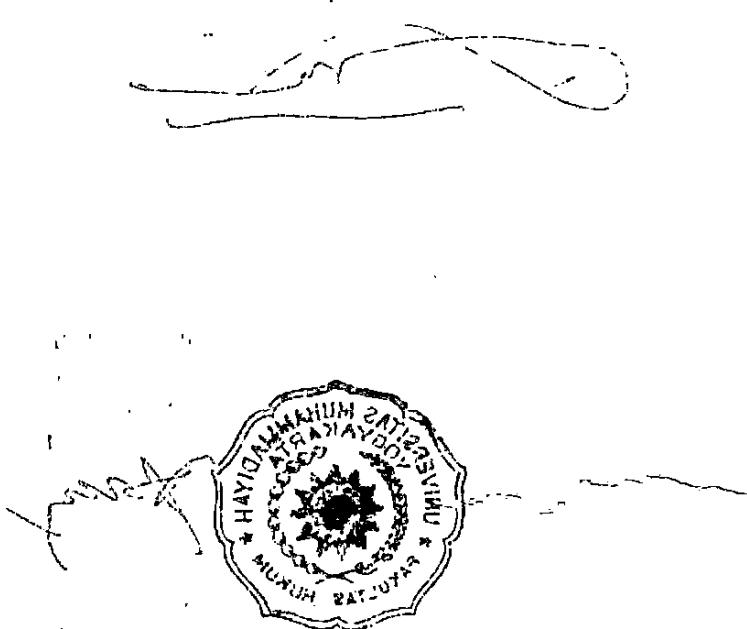
telah diuji di hadapan tim penelaah pada tanggal 12 Agustus 2005
yang terdiri dari:



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



1860



HALAMAN MOTTO

Demi masa!!! Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. (Yakni) orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan saling memberi nasehat kepada sesama (Q.S Al 'Ashr 1 - 4)

Hidup sekali, hiduplah yang berarti (Penulis)

Allah SWT. Memberikan Rizkinya kepada HambaNya berdasarkan Niat dan Usaha Kerasnya (Penulis)

Setiap kesulitan terdapat kemudahan.

Dan di setiap kesulitan selalu ada di baliknya doanya keberkahan (Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

...

HALAMAN KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Akhir Zaman Muhammad, SAW. Beserta seluruh kerabat, sahabat dan pengikutnya.

Berkat kerja keras dan dukungan dari segala pihak, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa apa yang telah penulis hadirkan disini bukanlah sebuah karya sempurna namun setidaknya merupakan karya besar yang telah penulis lakukan dengan judul "**Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan Otonomi Desa.**"

Penulis tidak berdiri sendiri, tidak berjalan sendiri dan tidak mungkin bisa melakukan segalanya sendiri hingga tulisan ini selesai tanpa dukungan orang-orang tercinta. Kepada mereka penulis haturkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak di antaranya:

1. Ayahanda Sardiman Hadi Pranyoto dan Ibunda tercinta Ngatemi.Spd atas dao dan restunya yang selalu menyertai.
2. Bapak Anang Sya'roni, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi I, yang telah berkenan memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nanik Praseyoningsih, SH. Selaku dosen pembimbing

membimbing, memberikan saran, masukan dan memberikan dukungan serta restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mengingat segala keterbatasan pengetahuan, pengalaman yang diperoleh, maka dengan segala kelapangan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semun pihak semoga senantiasa bermanfaat dan mendapat Ridho serta ganjaran dari Allah SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tinjauan Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Analisis Data.....	18

BAB II SISTIM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

A. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	19
B. Landasan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	21
C. Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah.....	29
D. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia	41
E. Dampak Pemerintahan Daerah di Indonesia	52

1. Sekretariat Daerah	52
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	53
3. Dinas Daerah	55
4. Lembaga Teknis Daerah.....	56
5. Kecamatan	56
6. Kelurahan	58

BAB III OTONOMI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pengertian Desa.....	60
B. Sejarah Pengaturan Otonomi Desa.....	67
C. Dasar Yuridis Otonomi Desa di Indonesia	68
D. Kewenangan Pemerintahan Desa	70

BAB IV KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN OTONOMI DESA

A. Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	77
B. Pengaturan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	81
1. Definisi Desa.....	82
2. Kepala Desa.....	83
3. Sekretaris Desa.....	85
4. Badan Permusyawaratan Desa	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90